

SKRIPSI

**STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM
MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI DI PEMILU 2019**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN OLEH :

GIBRAN

E041181501

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM
MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI DI PEMILU 2019

Disusun dan Diajukan Oleh :

GIBRAN

E041181501

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal : **24 AGUSTUS** 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Phill Sukti, M.Si.

NIP. 19750818 200801 1 008

Pembimbing Pendamping

Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si

NIP. 19680508 201901 5 001

Mengetahui

Ketia Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

STRATEGI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) DALAM
MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI DI PEMILU 2019

Disusun dan Diajukan Oleh :

GIBRAN

E041181501

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.

(.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.

(.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.

(.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia B., S.IP., M.IP.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GIBRAN
NIM : E041181501
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Di Pemilu 2019**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Agustus 2022



(GIBRAN)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Di Pemilu 2019”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Handoko, S.T., dan Ibunda Rasidah Rauf, S.T. Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si. dan Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., yang telah membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih pula penulis haturkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin

periode 2018-2022, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., yang telah memimpin Universitas Hasanuddin dengan berbagai goresan prestasi dan kegemilangan.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik, Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik beserta segenap jajaran staf akademik.
4. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
5. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Hamzah, S.Sos., Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah

membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.

7. Seluruh teman-teman Ilmu Politik angkatan 2018, terutama kepada sahabat dekat penulis yaitu Morsmun, Rakbinz, Dwin, Jacky, Ippang, Indra.
8. Seluruh teman-teman KKN UNHAS GELOMBANG 106 RAPPOCINI 7 : Dimas, Tum Brenda, Tum Didit, Kiko, Eta, Hesti, Bang Ag, Nabil, Dini, Yaya, Tum Rayhan, Bang Ai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, Agustus 2022

Gibran

ABSTRAK

Gibran E041181501. Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Di Pemilu 2019. Di bawah bimbingan Sukri sebagai Pembimbing Utama dan Muh. Imran sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan strategi Ofensif dan Defensif Partai Keadilan Sejahtera dalam Meningkatkan Elektabilitas di Pemilu 2019. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan Hambatan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan Legislatif tahun 2019.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data Primer dan Data Sekunder. Data yang didapatkan kemudian dibahas dalam kerangka teoritis Pendekatan Institusionalisme Baru, Konsep Partai Politik, dan Konsep Strategi Politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Ofensif yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah *Pertama*, melakukan sosialisasi dengan metode *Door to Door*. *Kedua*, melakukan pemetaan Daerah Pemilihan. Sedangkan Strategi Defensif yang dijalankan partai PKS adalah *Pertama*, melakukan penguatan internal partai. Strategi dapat berjalan dengan baik jika para kader dapat mengambil peran masing-masing dalam kontestasi politik. *Kedua*, mengoptimalkan peran kader yang telah menjabat di eksekutif maupun legislatif. Dan *Ketiga*, adalah melakukan perekrutan Calon Legislatif PKS secara terbuka. Dalam menjalankan strategi, PKS memiliki beberapa Hambatan. *Pertama*, ketidakpercayaan rakyat terhadap Partai Keadilan Sejahtera. *Kedua*, kemampuan finansial partai dan caleg yang berbeda-beda. *Ketiga*, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi menjelang pemilu legislatif 2019 menjadi sebuah hambatan bagi Partai Keadilan Sejahtera karena mampu membentuk opini masyarakat menjadi negatif pula, dan hal tersebut tentu saja akan mengurangi tingkat simpati dan kecenderungan memilih masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera. *Keempat*, hambatan untuk mencapai target elektabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah sigma masyarakat terhadap partai PKS yang dianggap radikal. *Kelima*, hambatan terakhir yang didapatkan oleh PKS dalam meningkatkan elektabilitas adalah money politik.

Kata Kunci: Strategi Politik, Ofensif, Defensif, Kampanye

ABSTRACT

Gibran E041181501. Strategy of the Prosperous Justice Party (PKS) in Improving Party Electability in the 2019 Election. Under the guidance of Sukri as Main Advisor and Muh. Imran as Companion Advisor.

This study aims to identify and describe the Offensive and Defensive strategies of the Prosperous Justice Party in Improving Electability in the 2019 Election. In addition, this study also aims to describe the Barriers faced by the Prosperous Justice Party in the 2019 Legislative election.

The type of research used is descriptive qualitative research with the type of case study. The data collection is done through interviews and documentation. The type of data used is primary data and secondary data. The data obtained are then discussed in the theoretical framework of the New Institutionalism Approach, the Concept of Political Parties, and the Concept of Political Strategy.

The results of this study indicate that the Offensive Strategy carried out by the Prosperous Justice Party is First, to disseminate with the Door to Door method. Second, mapping the Electoral District. While the Defensive Strategy carried out by the PKS party is first, to strengthen the party's internal. The strategy can work well if the cadres can take their respective roles in political contestation. Second, optimizing the role of cadres who have served in the executive and legislative branches. And Third, is to openly recruit PKS Legislative Candidates. In carrying out the strategy, PKS has several obstacles. First, the people's distrust of the Prosperous Justice Party. Second, the different financial capacities of parties and candidates. Third, the political events that occurred before the 2019 legislative elections became an obstacle for the Prosperous Justice Party because it was able to form negative public opinion, and this of course would reduce the level of sympathy and the tendency to vote for the people against the Prosperous Justice Party. Fourth, the obstacle to achieving the electability target in the 2019 general election is the public sigma towards the PKS party which is considered radical. Fifth, the last obstacle faced by PKS in increasing electability is money politics.

Keywords : Political Strategy, Offensive, Defensive, Campaign

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGATAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pendekatan Institusionalisme Baru	7
2.2. Konsep Partai Politik.....	11
2.3. Konsep Strategi Politik	16
2.4. Penelitian Terdahulu	22
2.5. Kerangka Pemikiran.....	27
2.6. Skema Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Lokasi penelitian	30
3.3. Objek penelitian	30
3.4. Informan Penelitian	30
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	33
3.6. Metode Pengumpulan Data	34
3.7. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV GAMBARAN UMUM	37
4.1. Gambaran Umum Sulawesi Selatan	37
4.2. Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera	44
BAB V PEMBAHASAN	51
5.1. Dinamika Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan Dalam Pemilu 2019	52
5.2. Strategi Ofensif Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai di Pemilu 2019	54
5.3. Strategi Defensif Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai di Pemilu 2019	65
5.4. Kendala Yang Dihadapi Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan Dalam Pemilu 2019.....	72
BAB VI PENUTUP.....	81
6.1. Kesimpulan	81
6.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Kursi Partai di DPRD Sulsel	3
Tabel 2.4 Penelitian Relevan	22
Tabel 4.1 Jumlah Dapil Provinsi Sulawesi Selatan	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Komposisi Anggota DPRD Prov. Sulsel	42
Gambar 4.2 DPRD Sulawesi Selatan Periode 2014-2019	49
Gambar 4.3 DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.¹

Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.² Sedangkan Carl J. Friedrich mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.³

Secara sederhana, ada yang menyebut bahwa partai politik adalah kendaraan, dimana pengurus dan calonnya berada dalam kendaraan

¹ Anang Anas Azhar, *Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat* (Yogyakarta: Atap Buku, 2017), hlm. 1.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 403.

³ Ibid, 404

tersebut untuk menjalankan dan mengikuti proses pemilu untuk mencapai garis finis kemenangan. Seberapa banyak penumpang alias masyarakat pemilih yang bisa diikutkan dalam kendaraan tersebut adalah kunci perolehan kursi atau jabatan kepala daerah. Bagaimana cara sopir mengendarai, bagaimana cara calon menyampaikan ajakan untuk ikut serta menumpang dalam kendaraan dan bagaimana kendaraan dihiasi untuk menarik semakin banyak pemilih menjadi kunci memenangkan pemilu dan pemilihan.

Calon anggota legislatif adalah seseorang yang kemudian akan bertindak untuk mewakili rakyatnya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk menjadi calon anggota legislatif, seseorang harus menjalani proses rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan. Penerapan strategi politik dalam pemilu legislatif dapat membantu kandidat atau parpol dan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu legislatif. Melalui strategi politik, kandidat atau parpol berusaha meyakinkan pemilih bahwa suatu kandidat atau parpol layak untuk dipilih. Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon anggota legislatif yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan anggota legislatif yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Jadi, strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang ikut serta dalam pentas perpolitikan di Indonesia. PKS sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik yang berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002. PKS yang dulunya bernama PK sudah mulai berpartisipasi dalam pemilu sejak 1999, dengan perolehan suara secara tingkat nasional 1.436.565 atau 1.36%. kemudian, pemilu tahun 2004 PKS memperoleh suara sebanyak 8.325.030 atau 7.34%. Pada pemilu 2009 PKS memperoleh suara sebanyak 8.204.946 atau 7.38%. Pada pemilu tahun 2014 PKS 8.480.204 atau 6.79% dan pada pemilu 2019 PKS mendapat 11.493.663 atau 8.21%.⁴

Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara Partai Golkar kini mulai tergerus oleh partai-partai lain, salah satunya PKS. Partai Golkar cenderung mengalami penurunan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dimana di Pemilu 2014 meraih 18 kursi, kini hanya meraih 13 kursi di Pemilu 2019. Adapun PKS mengalami peningkatan kursi dari sebelumnya 6 kursi di Pemilu 2014 kini menjadi 8 kursi di Pemilu 2019. Hal ini menunjukkan ada penguatan basis dari PKS sendiri di Sulawesi Selatan dari kalangan Islam yang bercirikan dakwah.

Tabel 1.1 Distribusi Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

⁴ Website Wikipedia. Profil Partai PKS. Diakses pada 2022-04-13: https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
 PKB	3	▲ 8
 Gerindra	11	— 11
 PDI-P	5	▲ 8
 Golkar	18	▼ 13
 NasDem	7	▲ 12
 PKS	6	▲ 8
 PPP	7	▼ 6
 PAN	9	▼ 7
 Hanura	6	▼ 1
 Demokrat	11	▼ 10
 PBB	1	▼ 0
 PKPI	1	▼ 0
Perindo		(baru) 1
Jumlah Anggota	85	— 85
Jumlah Partai	12	▼ 11

Berdasarkan data hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2014 untuk Kota Makassar, PKS memperoleh 6 jumlah kursi dalam komposisi anggota DPRD. Sedangkan data hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2019 untuk Kota Makassar, PKS memperoleh suara 8 jumlah kursi dalam komposisi anggota DPRD, dengan perolehan suara sebanyak 115.015.⁵ Hal ini menunjukkan peningkatan dalam jumlah kursi untuk PKS.

Peningkatan kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019 tidak hanya dialami oleh partai Islam seperti PKS saja, namun ada juga PKB dimana kursinya bertambah dari 3 menjadi 8 kursi. Ada kenaikan yang sangat signifikan, dibanding dengan PPP dan PAN yang

⁵ Website Wikipedia. Daftar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses pada 2022-04-13: https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Sulawesi_Selatan#Periode_2014-2019_3

menurun bahkan PBB yang harus kehilangan kursi. Namun, kenaikan kursi PKS dari 6 menjadi 8 kursi memiliki keunikan sendiri. PKS mengalami kehilangan kursi namun tertutupi oleh perolehan kursi baru. Di samping itu perolehan kursi PKS di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan cenderung menunjukkan stabilitas, dimana dari Pemilu 2009 hingga 2019 jumlah kursi PKS sebanyak 6-8 kursi. Kenaikan kursi PKS pada Pemilu 2019 juga memberi keuntungan dimana PKS menduduki satu jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dipegang oleh Muzayyin Arif.

Pada Pemilu 2014, 6 kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diraih PKS berasal dari 6 dapil yaitu Sulsel I (Makassar A), Sulsel II (Makassar B), Sulsel IV (Jeneponto, Bantaeng, Kepulauan Selayar), Sulsel VII (Bone), Sulsel VIII (Soppeng, Wajo), dan Sulsel XI (Luwu Raya). Pada Pemilu 2019, 2 kursi PKS terlepas yaitu pada dapil Sulsel IV dan Sulsel VIII. Terlepasnya 2 kursi ini mampu ditutupi oleh PKS dengan perolehan 4 kursi baru yaitu di dapil Sulsel III (Gowa, Takalar), Sulsel V (Bulukumba, Sinjai), Sulsel VI (Maros, Pangkep, Barru, Parepare), dan Sulsel IX (Pinrang, Sidrap, Enrekang). Keempat dapil ini diisi oleh pendatang baru PKS dimana pada Pemilu 2014 PKS tidak memiliki kursi dari dapil tersebut, namun di Pemilu 2019 PKS berhasil mendapatkan masing-masing 1 kursi dari 4 dapil tersebut pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pada dapil Sulsel III (Gowa, Takalar) ada Meity Rahmatia, dapil Sulsel V (Bulukumba, Sinjai) ada Isnayani, dapil Sulsel VI (Maros, Pangkep, Barru, Parepare) ada Muzayyin Arif, dan dapil Sulsel IX

(Pinrang, Sidrap, Enrekang) ada Vera Firdaus. Hal ini menunjukkan ada strategi politik yang dilakukan PKS dan terbukti berhasil pada keempat dapil tersebut. Strategi tersebut digunakan untuk merebut basis dan suara pemilih dari empat dapil tersebut. Strategi partai politik merupakan hal yang penting dalam melakukan dan menata partai politik untuk menjadi acuan perencanaan yang akan dilakukan oleh sebuah partai, akan tetapi yang terpenting bagi partai politik adalah proses yang dilakukan partai untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai di Pemilu 2019.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana strategi ofensif dan defensif yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan elektabilitas partai di pemilu 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengidentifikasi strategi ofensif dan defensif yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan elektabilitas partai di pemilu 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meningkatkan elektabilitas partai di pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis mampu menjadi referensi ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu politik dan memperkaya kajian ilmu politik di Indonesia tentang strategi meningkatkan elektabilitas partai di masyarakat pemilih.

2. Manfaat Praktis

Secara umum hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai strategi meningkatkan elektabilitas partai di masyarakat pemilih. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi partai politik yang akan berkompetisi dalam pemilu. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendekatan Institusionalisme Baru

Pendekatan institusionalisme baru merupakan pendekatan yang relatif muda dan berkembang dalam ilmu politik. Pendekatan yang mulai tumbuh dan berkembang sejak dekade 1970-an ini tidak hanya mempelajari politik dari aspek normatif dan institusional sebagaimana pendekatan institusionalisme lama atau yang dikenal juga dengan nama tradisionalisme. Institusionalisme baru juga memperhatikan aspek perilaku individu, gagasan, konflik, hingga struktur ekonomi dan politik. Para pendukung pendekatan institusionalisme baru ini secara umum berpandangan bahwa mempelajari institusi sangat penting karena institusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peristiwa, perilaku dan perubahan politik. Meskipun bukan lagi dipandang sebagai faktor determinan, namun institusi tetap diperlakukan sebagai salah satu faktor yang penting di dalam studi politik. Dari segi metodologi, pendekatan institusionalisme baru tidak lagi menggunakan metodologi tradisionalisme, akan tetapi berkembang mengikuti perkembangan metodologi di dalam ilmu sosial lainnya⁶. Hall dan Taylor (1996) membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme

⁶ Meidi Kosandi, "Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014", *Jurnal Politik*, Volume 1 Nomor 1, 2015.

historis, institusionalisme pilihan rasional, dan institusionalisme sosiologis⁷.

Institusionalisme historis, menurut Hall dan Taylor, merupakan pendekatan yang mempertimbangkan faktor gagasan, perilaku individu, maupun pengaruh struktur di dalam interaksi politik yang melibatkan institusi. Di dalam studi politik, pada umumnya faktor-faktor tersebut dipelajari dengan pendekatan yang berbeda-beda. Faktor gagasan umumnya dipelajari dengan pendekatan normatif atau dekonstruktif. Faktor perilaku individu umumnya dipelajari dengan pendekatan behavioral (positivisme) atau pilihan rasional. Sedangkan faktor struktur pada umumnya dipelajari dengan pendekatan Marxisme, teori elite, atau realisme. Para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme historis berusaha untuk berpikir terbuka terhadap kemungkinan berlakunya berbagai faktor tersebut dan tidak membatasi analisisnya hanya pada faktor tertentu saja. Mereka menekankan bahwa studi ilmu politik seharusnya lebih difokuskan pada sejarah mengenai apa yang terjadi, apa yang dipikirkan dan apa yang dicitrakan, bukannya berpegang terlalu ketat pada kerangka teoritis.

Inilah yang membuat mereka disebut sebagai institusionalisme "historis" karena bagi mereka "*history matters*". Perubahan yang terjadi dalam suatu proses institusionalisasi seperti pembuatan kebijakan, pola proses dan hasilnya bisa berbeda-beda setiap kasus, atau disebut juga path dependent. Oleh karena itu, analisis kontekstual historis terhadap

⁷ Peter Hall dan Rosemary Taylor, *Political Science and The Three New Institutionalisms* (Paper. Max-Planck-Institut fur Gesellschaftsforschung, 1996), hlm 54.

suatu proses institusionalisasi dan dampaknya perlu dilakukan untuk dapat benar-benar memahami suatu peristiwa, perilaku atau perubahan politik.

Institusionalisme pilihan rasional memandang proses institusionalisasi sebagai suatu mekanisme instrumental untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama (collective action dilemmas). Manusia secara individual dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan kepentingan rasional. Setiap tindakan politik dari para aktor rasional tersebut didasari oleh perhitungan untung-rugi dan aksi-reaksi dari aktor lainnya. Interaksi di antara aktor-aktor rasional ini dapat menimbulkan persaingan dan konflik yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan banyak orang. Pembentukan institusi pada umumnya dipandang sebagai agen untuk menyelesaikan masalah kolektif, termasuk konflik dan distribusi nilai.

Bagi para penganut institusionalisme pilihan rasional, para aktor politik akan lebih cenderung untuk memilih institusionalisasi daripada kekosongan institusi. Kehadiran institusi memberikan insentif bagi kerjasama dan pertukaran (gains from cooperation dan gains from exchange) karena menghindarkan para aktor politik dari ketidakpastian hasil dari persaingan dan konflik di antara mereka. Dengan saling bekerjasama dan bertukar informasi, dapat terjalin koordinasi yang memastikan ekuilibrium dan mengurangi biaya transaksi politik . Oleh karena itulah manusia cenderung untuk memilih institusionalisasi dan oleh karena itu juga manusia cenderung untuk patuh kepada institusi

sepanjang ekuilibrium terpelihara. Akan tetapi sebaliknya, jika ekuilibrium terganggu, dalam arti ada pihak yang dirugikan, para aktor akan menuntut revisi pada institusi atau membentuk institusi baru.

Kelompok teori yang ketiga, yaitu institusionalisme sosiologis, menekankan studi institusi politik pada aspek gagasan, norma, budaya dan identitas. Menurut Hall dan Taylor para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme sosiologis berpandangan bahwa studi politik harus mencakup tidak hanya aturan-aturan formal, aspek kognitif, dan kerangka moral, namun juga kerangka pedoman bagi tindakan manusia. Dalam perspektif ini, terdapat tumpang tindih pengertian antara institusi dengan budaya. Kajian institusi yang sering dipandang berbeda karena berdasarkan struktur dan organisasi, dibandingkan dengan kajian budaya yang berdasarkan pemahaman tentang nilai-nilai, sikap dan perilaku bersama; dalam perspektif institusionalisme sosiologis ini sama dengan budaya. Budaya sendiri dipandang sebagai institusi. Di sinilah letak relevansi nomenklatur 'sosiologi' yang dilekatkan pada institusionalisme dalam perspektif ini, karena adanya penekanan dalam perspektif ini untuk mempelajari dimensi kognitif dari institusi. Institusi dipelajari dari pola perilaku, simbol-simbol, norma yang memberi pedoman bagi perilaku, dan identitas. Model perspektif ini memiliki kemiripan dengan salah satu kecenderungan studi dalam sosiologi, yaitu konstruktivisme sosial.

Institusionalisme sosiologis memandang bahwa institusi mempengaruhi individu, termasuk dalam hal preferensi dan identitasnya. Berlawanan dengan teori pilihan rasional yang mengatakan bahwa

perilaku politik manusia didorong oleh kepentingan obyektif (*interest-driven*), kalangan penganut teori institusionalisme sosiologis cenderung berpandangan bahwa justru institusi yang membentuk preferensi dan identitas individu. Hal ini karena di dalam praktiknya tidak semua institusi dan organisasi dibentuk untuk memaksimalkan kepentingan obyektif atau material. Banyak di antaranya dibentuk berdasarkan budaya atau nilai-nilai bersama. Dalam kaitannya dengan identitas, menurut teori ini, umumnya institusi dibentuk bersifat isomorfis, yaitu berdasarkan kesamaan identitas, preferensi kebijakan atau posisi di dalam struktur. Institusi membentuk preferensi dan identitas karena individu ingin berperilaku sesuai dengan lingkungan sosialnya, bukan hanya karena perhitungan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi atau kekuasaan.

2.2. Konsep Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk

hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.⁸

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.⁹

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁰

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk

⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, (Rajawali Pers, 2011), hlm 34

⁹ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 85.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 59.

menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹¹

Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.¹²

Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Dengan cara yang sama, Ware (1996:5) mengambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut. Bagi Budirdjo, partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir dimana

¹¹ A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 77.

¹² Syafif Kencana Inu dan Ashari, *Sistem Politik Indonesia*, (PT. Refika Aditama, 2005), hlm 86

anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan, politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijaksanaan) mereka.¹³

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.¹⁴

Sigmund Neuman dalam buku dasar-dasar ilmu politik mengartikan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut

¹³ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013).

¹⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, (Rajawali Pers, 2011), hlm 38.

dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan prantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut Ware mendefinisikan partai politik sebagai lembaga yang menghantarkan rakyat pada tujuan kekuasaan dalam sebuah negara. Ware menawarkan karakteristik partai politik sebagai berikut. Pertama, tujuan partai politik adalah menghantarkan negara pada tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat dari pada sekedar merebut kekuasaan. Kedua, partai politik dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk meraih tujuan utama meraih kekuasaan dari sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintah. Ketiga, ada sekelompok organisasi politik yang mengklaim diri mereka sebagai partai politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik seperti terlibat dalam pemilu. Tetapi mereka tidak menjadi kontestan resmi dalam pemilu. Tujuan organisasi politik ini hanya sekedar menjadi menghibur dalam aktivitas-aktivitas politik. Di luar tiga karakteristik tersebut, partai politik selalu berusaha mencari legitimasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh tujuan akhir mereka. Dalam makna yang lain, ware mendeskripsikan partai politik sebagai bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang di anut.¹⁵

¹⁵ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, (Rajawali Pers, 2011), hlm 38.

Firmanzah mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Karena itu, partai politik setidaknya memiliki empat karakteristik dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki organisasi yang berjenjang (pusat, daerah, cabang, ranting) dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level, memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

2.3. Konsep Strategi Politik

Sejalan dengan Pemikiran Arnold Steinberg dalam buku Toni Andrianus, dkk. Mengatakan bahwa strategi adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi memengaruhi sukses

atau gagalnya strategi pada akhirnya. Sementara sejalan dengan pemikiran Carl Vob Clausewitz dalam buku Toni Andrianus,dkk. Mengatakan bahwa perbedaan antara taktik dan strategi yaitu taktik adalah seni menggunakan “kekuatan bersenjata” dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. Sedangkan, strategi adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya.¹⁶

Adapun jenis-jenis strategi sebagai berikut:¹⁷

1. Strategi Ofensif

Bagi Schoder, strategi ofensif selalu dibutuhkan misalnya apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Dalam kedua kasus tersebut harus lebih banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai atau proyek tersebut, sehingga kampanye tersebut berhasil. Yang termasuk strategi ofensif adalah strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar.

a. Strategi Perluasan Pasar

Strategi perluasan pasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Dalam Kampanye Pemilu Dalam kampanye pemilu, strategi perluasan pasar yang ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada.

¹⁶ Toni Andrianus Pito (dkk), *Mengenal Teori-Teori Politik*. (Bandung: Penerbit Nuansa 2016), hlm 104.

¹⁷ Ibid, 106

Oleh karena itu harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Jadi yang dibahas disini adalah strategi persaingan yang faktual, dimana berbagai partai bertarung untuk kelompok pemilih dalam sebuah kompetisi. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye pengantar untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Bagi partai sendiri harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan diantaranya harus ada pernyataan bahwa partai berorientasi program yang baru yang bersifat melengkapi, bersamaan dengan ditampilkannya program baru maka partai juga ikut berubah, program-program yang ada harus dipasangkan dengan individu-individu yang menunjukkan keselarasan antara program dan individu dan program atau tema baru tidak dapat muncul secara tiba-tiba.

2) Dalam Implementasi politik Dalam kasus ini, produk baru yang ditawarkan yaitu politik baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan politik baru tersebut, perlu diiklankan. Di sini pihak eksekutif seringkali salah bertindak karena produk dan keuntungan yang ditawarkannya tidak dirumuskan secara jelas, sehingga tidak dapat dimengerti oleh warga. Sebelum pelaksanaan, perlu dilakukan pekerjaan kehumasan yang cukup karena apabila hal ini tidak dilakukan proyek tersebut sewaktu-

waktu dapat didiskriminasikan. Produk atau politik yang sejak lama sudah ada di pasaran dan belum berhasil diimplementasikan secara sukses, atau bahkan gagal mengarah kepada perluasan pasar jika tetap menggunakan namanya yang lama produk atau politik semacam ini membutuhkan nama yang baru, deskripsi baru dari keuntungan yang ditawarkan dan apabila diinginkan juga sebuah kemasan baru yang dihubungkan dengan individu-individu baru. Pertentangan internal perlu diatasi, sedapat mungkin sebelum dilakukan kampanye terbuka atas produk atau politik tersebut.

b. Strategi Menembus Pasar

Menurut Peter Schoder, strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki dalam kelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Tujuan yang dimiliki misalnya adalah diperolehnya hasil yang lebih baik dalam sebuah target, hal ini menyangkut pemasaran program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. Bagi organisasi ini, berarti :

- 1) Peningkatan motivasi multiplikator dan pemegang jabatan, melalui iklan keuntungan yang ditawarkan secara lebih baik.

- 2) Pemanfaatan jalur komunikasi yang baru.
- 3) Perbaikan argumentasi melalui pembinaan.
- 4) Penggerakan emosi kelompok target dengan memanfaatkan iklim/keadaan tertentu atau dengan menciptakan gambaran musuh bersama.

2. Strategi Defensif

Strategi defensif akan muncul ke permukaan, misalnya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau apabila pasar ingin dipertahankan. Selain itu strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin di tutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin.

a. Strategi Mempertahankan Pasar

Strategi ini merupakan strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah. Dalam kasus semacam ini partai akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung. Terhadap partai oposisi yang menyerang, partai pemerintah kan berusaha mengaburkan perbedaan yang ada dan membuat perbedaan tersebut tidak dapat dikenali lagi. Untuk itu mereka menggunakan berbagai rincian strategi yang berbeda, seperti misalnya strategi yang disebut sebagai strategi disinformasi. Partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang

bertentangan dari partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru ingin agar perbedaan yang ada tidak dikenali. Dalam hubungannya dengan multiplikator dan aliansi, partai-partai yang menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara intensif kepada mereka. Data-data tentang keberhasilan yang diperoleh disebarluaskan pada lingkungan sekitar. Investasi terutama dilakukan dalam bidang kehumasan. Dalam organisasi, proses semakin dipermudah, rutinitas dikembangkan dan dengan demikian pengeluaran pun ditekan.

b. Strategi Menyerahkan Pasar

Contoh dari strategi menyerahkan pasar ini adalah apabila dua minggu setelah pemungutan suara kedua hanya boleh diikuti dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pertama, maka para kandidat lainnya dihadapkan pada pertanyaan strategi apa yang akan diterapkan dalam 14 hari tersebut, dalam hal ini tidak ada pasar yang dipertahankan. Namun apabila kandidat terpaksa menyerahkan pasarnya, mereka harus mempertegas ketidakikutsertaannya dengan memberikan alasan yang mendasar dan mengusulkan pilihan lain. Dalam usulan ini terletak suatu tugas yang dimanfaatkan secara strategis. Tentu saja kondisi-kondisi suatu usulan pemilu dapat diperdebatkan dengan para kandidat lainnya. Hal ini dapat mencakup masalah persetujuan

politik hingga pembagian kekuasaan, dan perlu disertai dengan kampanye informasi bagi para multiplikator.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4. Penelitian Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sehatman Al-Akbar Hasibuan (2018)	Pengaruh Pesantren Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren Al Kautsar Al-Akbar Kota Medan)	Secara sistem, Pesantren al-Kautsar al-Akbar menganut pondok modern. Tetapi dalam proses pengajaran dan pendidikan, kami menerapkan sistem salafiyah. Peran pesantren al Kautsar al Akbar dalam meningkatkan elektabilitas calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 terlihat dalam bentuk dukungan yang diberikan pesantren terhadap salah satu pasangan calon. Dukungan tersebut diberikan berdasarkan tindakan nyata yang diberikan paslon buat

			umat Islam Sumatera Utara. Lewat dukungan tersebut nantinya akan berdampak kepada elektabilitas paslon dalam tingkat keterpilihannya
2	Rachmadi & Budianto (2020)	Political Branding Tagar #2019gantipresiden Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Di Ranah Media Sosial*	Hasil penelitian menunjukkan pentingnya branding politik bagi partai politik yang utamanya mengikuti kontestasi lima tahunan dalam sistem pemilu di Indonesia untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Partai politik yang modern harus bisa menggarap dengan serius branding politiknya agar mampu dan di terima oleh segmen atau target yang akan diambilnya.

3	Permatasari (2020)	Strategi Elektoral Partai Islam: Studi Pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menghadapi Pemilu 2019	Berdasarkan penelitian, PKS dalam menghadapi Pemilu 2019 melakukan pendekatan yang berbeda, terlihat dari awal pasca Pemilu 2014. PKS adanya pergantian pimpinan baru yang terlihat berbeda dari pada sebelumnya pada pimpinan Anis Matta. setelah itu ada momentum dari gerakan 212, PKS terlihat eksklusif kembali dengan dekatnya kelompok-kelompok Islam yang tergabung pada pencapresan penantang yang didukung alumni gerakan 212. Terdapat hashtag gerakan #2019GantiPresiden PKS mendapatkan banyak dukungan, karena hashtag yang digagas dari kader
---	-----------------------	---	---

			PKS menjadikan gerakan yang sangat masif serta terdapat banyak dukungan, dukungan tidak lain irisan dari gerakan 212
4	Kamal, Darmawan & Agustino (2021)	Strategi Komunikasi Politik PKS Jawa Barat Dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Strategi komunikasi yang dilakukan setiap kader dan Calon Legislatif yang mencalonkan yaitu membangun citra diri yang inklusif dan menghilangkan citra partai yang eksklusif, menghilangkan stigma miring (stereotype) di masyarakat, membangun kerjasama dengan semua elemen bangsa, mendapat tempat di hati masyarakat, serta adanya kekuatan dari para kader

			partai PKS dengan saling membantu dan solidaritas yang tinggi maka bisa saling membantu untuk berkampanye dan menurunkan biaya kampanye.
5	Verdi Yoana (2015)	Strategi Kampanye Politik Partai Politik Gerindra Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014	Berdasarkan analisa data, dapat dikatakan bahwa strategi kampanye politik partai politik gerindra pada pemilihan legislatif tahun 2014 adalah menggunakan strategi penokohan pada sosok Prabowo Subianto. Semua kegiatan dan program yang dilakukan Gerindra pasti mengedepankan sosok Prabowo dihadapan publik maupun media.

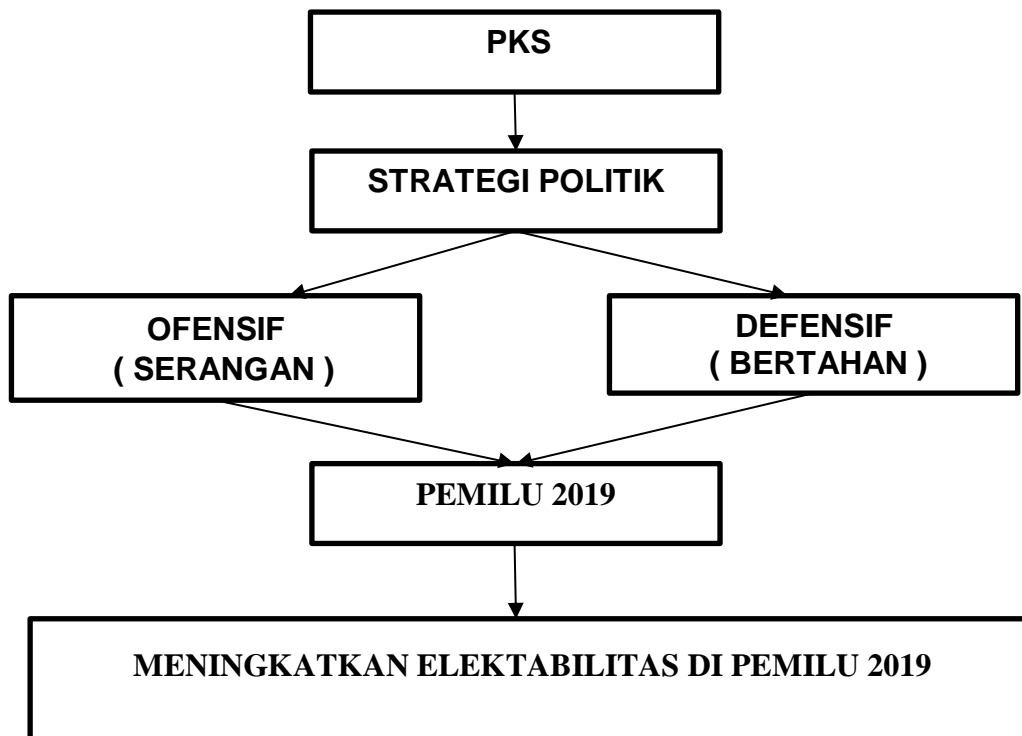
Dari lima penelitian terdahulu di atas, penelitian saya memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini akan melihat strategi PKS dalam meningkatkan perolehan kursi DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019. Perolehan kursi ditandai dengan bertambahnya 4 kursi baru dari 4 dapil. Penelitian ini akan menggunakan analisis strategi politik ofensif dan defensif dalam melihat cara-cara PKS Sulawesi Selatan mendapatkan kursi baru di Pemilu 2019.

2.5. Kerangka Berpikir

Toni Andrianus dkk. mengatakan bahwa strategi adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat menjadi PK Sejahtera merupakan partai berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan dakwah Islam. Sebagai sebuah partai politik tentunya PKS juga menggunakan strategi politik saat menghadapi pemilihan umum guna meningkatkan perolehan kursi dan mempertahankan kursi yang telah ada. Berkaca pada pemilu 2019 di Sulawesi Selatan, PKS berhasil menambah kursinya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari 6 kursi menjadi 8 kursi sehingga mampu menduduki satu posisi Wakil Ketua DPRD. Hilangnya 2 kursi tidak terlalu memberikan pengaruh buruk yang karena tertutupi oleh bertambahnya 4 kursi baru PKS di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan ada strategi politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2019 dan berhasil dilakukan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui strategi Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan dalam meningkatkan elektabilitas partai di pemilu 2019.

2.6. Skema Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memiliki landasan dari filsafat *postpositivism* dengan menggunakan obyek penelitian yang alamiah dengan menggunakan instrument kunci, dalam mengambil sampel penelitian dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, sedangkan untuk pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data triangulasi, di mana pada analisis yang memiliki sifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih mengutamakan pada makna generalisasi.¹⁸ Prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif dengan bentuk jawaban-jawaban atau kata-kata tertulis dari perilaku orang-orang disekitar yang diamati.

Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian kualitatif dapat dilakukan secara intensif, selain itu juga peneliti dapat ikut serta dalam berpartisipasi selama berada di lapangan, kemudian mencatat secara teliti berbagai fenomene yang terjadi, dan melakukan analisis reflektif terhadap berbagai macam dokumen yang ditemukan dilapangan, serta melakukan pembuatan laporan penelitian secara lengkap dan detail. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori, akan tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sesuai

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 26.